WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 100.3.3.3/1/BAKEUDA/I/2026

TENTANG

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan pelimpahan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

KEDUA : Pejabat yang diberi wewenang mengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang serta tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat yang diberi wewenang mengelola keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

KESEPULUH : Jika Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sedang menjalani cuti, diklat, dan sakit maka untuk penandatangan dokumen pencairan dapat dilaksanakan oleh pejabat yang mewakili/pejabat yang diberi kuasa, sampai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugas kembali.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.

KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

SAPARUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3/1/BAKEUDA/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 6. Memimpin TAPD.
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda; d. Melaksanakan fungsi BUD; dan e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah antara lain : - menandatangani SPP dan kwintasi dana bagi hasil, hibah dan bantuan keuangan propinsi. - menandatangani bukti penerimaan dana transfer pemerintah pusat - menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) - dan tugas lain yang dilimpahkan kepala daerah f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. Menetapkan anggaran kas dan SPD; g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; l. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: - mengelola investasi; - menetapkan anggaran kas; - melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; - membuka rekening kas umum daerah; - membuka rekening penerimaan; - membuka rekening pengeluaran, dan - menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawan pelaksanaan APBD. m. Menandatangani dokumen keuangan antara lain : - Surat Penyediaan Dana (SPD) - DPA-OPD / DPPA OPD - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Surat Penolakan Penerbitan SP2D - dan dokumen lain yang di limpahkan kepala daerah
3.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah; 2. Penyusunan kebijakan petunjuk teknis, operasional dan petunjuk pelaksanaan sistem administrasi pendapatan daerah; 3. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Melakukan penetapan pajak daerah. 5. Melakukan penandatanganan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dengan nominal sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
4.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	1. Melakukan penagihan ketetapan pajak daerah; 2. Melakukan penagihan dan penyusunan serta mengusulkan kebijakan terhadap piutang pajak daerah; 3. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala; 4. Membuat kajian dan mempertimbangkan terhadap permohonan pengurangan dan/atau keberatan pajak daerah maupun terkait pembatalan ketetapan pajak daerah; 5. Menyusun kebijakan terhadap rangkaian pemungutan pajak daerah.
5.	Kepala OPD, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Pejabat lain apabila di tunjuk sebagai PA / KPA	1. Selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas: a. Menyusun RKA dan DPA SKPD; b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. Menandatangani SPM; h. Mengelola barang milik daerah; i. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: - menyusun anggaran kas SKPD; - melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; - menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah (NPHD); - menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; - menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. p. Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dikarenakan Pejabat Definitif belum ada maka tugas dan wewenang sama dengan Pengguna Anggaran dan disebut sebagai Pengguna Anggaran

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		2. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani SPM TU dan SPM LS f. Mengelola barang milik daerah g. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja i. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya j. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; k. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
6.	Bendahara Pengeluaran	1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS; 2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU serta melakukan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya; 3. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 5. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, dan; 6. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7 Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaan selaku bendahara pada OPD.
7.	Bendahara Penerimaan	Menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan APBD.
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD; 4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik, dan;
9.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan APBD.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

SAPARUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3 / 1 /BAKEUDA/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

PEJABAT PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

No	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. Muhammad Yasin., S.E., M.M 197311222002121006	Bendahara Umum Daerah
2.	Harry, S.Kom 198405082010011011	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
3.	Zulfian, S.E 198309162008041002	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

SAPARUDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3/1/BAKEUDA/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

BENDAHARA PENERIMAAN / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
1.1	Mie Go, S.T., M.Si 197301072000031005	Pengguna Anggaran
1.2	Adi Priyono, A.Md 198408172010011010	Bendahara Pengeluaran
2.	SEKRETARIAT DPRD	
2.1	Fibriyani, S.STP 198302032001122001	Pengguna Anggaran
2.2	Syahrial 198311152008011005	Bendahara Pengeluaran
3.	INSPEKTORAT	
3.1	Muhamad Syahrial, SH, MH, QRMP, CGRE 197107132005011006	Pengguna Anggaran
3.2	Saptaraga, S.Pd. SD 197509152001031001	Bendahara Pengeluaran
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
4.1	Yan Rizana, ST, M.Si 197601232005011006	Pengguna Anggaran
4.2	Harwanty, A.Md 197209292011012001	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
5.1	Fahrizal, S.T.,M.M 198502062008041001	Pengguna Anggaran
5.2	Herdoni, S.IP 198403222010011001	Bendahara Pengeluaran
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.1	Donal Tampubolon. A.P., M.Si 197505221993111001	Pengguna Anggaran
6.2	Ariesta Aviadevi. A 197504022009012006	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.1	Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si 197208241998031002	Pengguna Anggaran
7.2	Topan Firmansyah 198212112012121002	Bendahara Penerimaan
7.3	Lia Safriyani, ST 198610252011012011	Bendahara Pengeluaran
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
8.1	Dedy Revandi, S.H., M.H 197609192002121005	Pengguna Anggaran
8.2	Banu Tanzili, A.Md 199102112022031006	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
9.1	Samri, SP, M.Si 197205041993031006	Pengguna Anggaran
9.2	Hares Purnomo, A.Md 198603052020121002	Bendahara Penerimaan
9.3	Muhammad Rifki, SE 199505252020121004	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
10.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
10.1	Ir. M. Belly Jawari, ST, M.Si 197907252005011008	Pengguna Anggaran
10.2	Sulastri, A.Md 198009012007012015	Bendahara Penerimaan
10.3	Alde Fatrian Hafidz, A.Md 198707192020121001	Bendahara Pengeluaran
11.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
11.1	Dr. Muhammad Yasin, S.E.,M.M 197311222002121006	Pengguna Anggaran
11.2	Desti Aryati, A.Md 198412032011012004	Bendahara Penerimaan
11.3	Syaftiansah, A.Md 198010062014071004	Bendahara Pengeluaran
12.	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
12.1	Andika Saputra, S.H., M.H 198302082009031005	Pengguna Anggaran
12.2	Nopi Sansia, S.H 198011102009012009	Bendahara Penerimaan
12.3	Andi Achmad 197811292008011002	Bendahara Pengeluaran
13.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
13.1	Erwandy, SE, MM 197207202006041004	Pengguna Anggaran
13.2	Yulianti Fitriani, S.Pd. SD 198207232014072001	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
13.3	Efendi, S.Ikom.,M.M 197304212007011008	Kuasa Pengguna Anggaran Pada Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, 3. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
13.4	Tilawati, S.E 198406152009032009	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, 3. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
13.5	Sumepi, S.H 197609262007011002	Kuasa Pengguna Anggran Pada Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pada Program Pengembangan Kurikulum Sub Kegiatan: 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, 2. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
13.6	Somadya Handayani, A.Md 198507232024211003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pada Program Pengembangan Kurikulum Sub Kegiatan: 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, 2. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
13.7	Ratna Purnamasari, S.E 197904092005012009	Kuasa Pengguna Anggaran Pada Program Pengembangan Kebudayaan Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Kesenian dan Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, 3. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, 4. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
13.8	Sudarmin, S.Ant 199312192020121001	Bendahara Pengeluaran Pembanrtu Pada Program Pengembangan Kebudayaan Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Kesenian dan Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, 3. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, 4. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
14.1	M. Agus Salim, ST 197407162005011008	Pengguna Anggaran
14.2	Suhiyat, SE 197010082009011003	Bendahara Pengeluaran
14.3	Yuni 197707192012122001	Bendahara Penerimaan
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
15.1	Dedy Ristrianto, S.Sos 197012181998031010	Pengguna Anggaran
15.2	Eka Sari, A.Md 199704172020122004	Bendahara Pengeluaran
16.	DINAS SOSIAL	
16.1	Khotaman Barka, S.STP, M.Tr.I.P 198302102001121002	Pengguna Anggaran
16.2	Selfia Indarina 197809292007012018	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
17.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
17.1	Darwin, S.Pd. Mat 196807091994121002	Pengguna Anggaran
17.2	Reni Dwi Septiani, A.Md 198707272022032006	Bendahara Pengeluaran
18.	DINAS PARIWISATA	
18.1	Irma Mutiah Sari, SS.,M.Si 197109072005012008	Pengguna Anggaran
18.2	Ramses Simanjorang, SE 199411162020121001	Bendahara Penerimaan
18.3	Kiki Meilita, A.Md 198505182020122003	Bendahara Pengeluaran
19.	DINAS PERHUBUNGAN	
19.1	Jumadi, SPd 197105142000031001	Pengguna Anggaran
19.2	Bangun Ludiro Permadi, A.Md 198306192010011006	Bendahara Penerimaan
19.3	Yunarni, A.Md 197706202010012004	Bendahara Pengeluaran
20.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
20.1	Efran, S.STP, M.Tr.I.P 198207072001121005	Pengguna Anggaran
20.2	Herlita Ruslini, S.M 198909142022032008	Bendahara Pengeluaran
21.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
21.1	Endang Supriyadi, S.T., M.T 197606122000031003	Pengguna Anggaran
21.2	Dewi Sartika, A.Md 198205062010012015	Bendahara Penerimaan
21.3	Salbiah, S.AP 197408142007012032	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
22.1	Dedi Aldriyansyah, S.H 197001062005011005	Pengguna Anggaran
22.2	Sulisdiana 198004192006042004	Bendahara Pengeluaran
23.	KECAMATAN BUKIT INTAN	
23.1	Muhammad Amir, S.Pd, M.M 197009272006041004	Pengguna Anggaran
23.2	Oskan Chandra Amarta 197510022009011003	Bendahara Pengeluaran
24.	KECAMATAN RANGKUI	
24.1	Muhammad Subhan, SE, M.Si 196901052006041001	Pengguna Anggaran
24.2	Tri Handayani, A.Md 197408092014072002	Bendahara Pengeluaran
25.	KECAMATAN GERUNGGANG	
25.1	Richard Syam, S.STP, M.AP 198604292006021001	Pengguna Anggaran
25.2	Supianto 198002122012121002	Bendahara Pengeluaran
26.	KECAMATAN TAMAN SARI	
26.1	Randi Aprianto, S.STP., M.AP 198604202006021001	Pengguna Anggaran
26.2	Nurhayanti 198107112008012005	Bendahara Pengeluaran
27.	KECAMATAN PANGKALBALAM	
27.1	Purnamawan, SE, M.Si 196905031993031007	Pengguna Anggaran
27.2	Pairastyani Marandika, SKM.,MPH 198603262009032004	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
28.	KECAMATAN GABEK	
28.1	Suandi, S.IP.,M.M 197206031994021004	Pengguna Anggaran
28.2	Randa Nugraha, A.Md 198608152020121001	Bendahara Pengeluaran
29.	KECAMATAN GIRIMAYA	
29.1	Luthfi Darma Saputra, S.IP 198912042010101001	Pengguna Anggaran
29.2	Miranda Rosadi 198505152015022001	Bendahara Pengeluaran
30.	DINAS KESEHATAN	
30.1	dr. Muhammad Thamrin 197910012008041001	Pengguna Anggaran
30.2	Wahyudi, S.K.M 198708042010011001	Bendahara Penerimaan
30.3	Dewi Indra Sari, SE 198011202015022001	Bendahara Pengeluaran
31.	UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
31.1	dr. Della Rianadita 198906032015022001	Kuasa Pengguna Anggaran
31.2	Seprianti, A.Md 198704142011012007	Bendahara Penerimaan BLUD
31.3	Tamrin Halomoan Lubis, SE 19780801201001 1 015	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
32.	UPTD. PUSKESMAS GIRIMAYA	
32.1	Emi Yuliani, SKM, M.M 197107051991032001	Kuasa Pengguna Anggaran
32.2	Lusi Andewi, A.Md.Ks 199903042022032007	Bendahara Penerimaan BLUD
32.3	Junita Sari, AMK 198206282010012020	Bendahara Pengeluaran BLUD
32.4	Sariniarti, A.Md 198108222011012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
33.	UPTD. PUSKESMAS AIR ITAM	
33.1	dr. Setyo Abdi Nugroho 199111092022031003	Kuasa Pengguna Anggaran
33.2	Hanadia Pertiwi, AMd.GZ 199410012019022007	Bendahara Penerimaan BLUD
33.3	Suciati, SKM 198412172019022002	Bendahara Pengeluaran BLUD
33.4	Liza, S.K.M 198905202019022005	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
34.	UPTD. PUSKESMAS PASIR PUTIH	
34.1	drg. Widiyanita Wahab 198501222010012016	Kuasa Pengguna Anggaran
34.2	Ade Risvan Situmeang, Amd, P.K 199309192020121006	Bendahara Penerimaan BLUD
34.3	Evi Fitriah, AM.Keb 197812252006042006	Bendahara Pengeluaran BLUD
34.4	Fajria Siska, AMK 198509062010012024	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
35.	UPTD. PUSKESMAS MELINTANG	
35.1	dr. Hisar Mangoloi Manalu, M.K.M 197603202005011007	Kuasa Pengguna Anggaran
35.2	Zulfa Mawaddah, S.KM 198810032019022003	Bendahara Penerimaan BLUD
35.3	Ns. Riningsih, S.Kep 199507052022032009	Bendahara Pengeluaran BLUD
35.4	Ns. Atika Dewi Kharisma, S.Kep 199112182022032009	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
36.	UPTD. PUSKESMAS PANGKALBALAM	
36.1	M. Afhan Nasution, S.K.M 196804041988031003	Kuasa Pengguna Anggaran
36.2	Iman Fatulloh, A.Md.RMIK 199206232020121002	Bendahara Penerimaan BLUD
36.3	Tika Pustika Fersari, AMKL 199310132020122004	Bendahara Pengeluaran BLUD
36.4	Yesy Octarianti, A.Md.Farm 199410312022032018	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
37.	UPTD. PUSKESMAS SELINDUNG	
37.1	drg. Cut Nurlaila 197511262006042015	Kuasa Pengguna Anggaran
37.2	Maula Violetta, A.Md.Kes 199907232022032010	Bendahara Penerimaan BLUD
37.3	Anggi Juliani, A.Md.RMIK 199907182022032001	Bendahara Pengeluaran BLUD
37.4	Fauziah, AMK 198512052010012027	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
38.	UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG	
38.1	dr. Fitriana 197310062006042009	Kuasa Pengguna Anggaran
38.2	Virgita, A.Md. Perkes 198709042022032003	Bendahara Penerimaan BLUD
38.3	Ria Carolina, AMK 198710192010012011	Bendahara Pengeluaran BLUD
38.4	Sulisa, AMKG 198711012010012023	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
39.	UPTD. PUSKESMAS TAMAN SARI	
39.1	Gustri Olivianti, S.Kep 198308222009032005	Kuasa Pengguna Anggaran
39.2	Lia Apriani, SKM 198604222002042001	Bendahara Penerimaan BLUD
39.3	Henni Aprilia, Am.Keb 198404142006042009	Bendahara Pengeluaran BLUD
39.4	Evy Feriyani, SKM.M.K.M 198205052011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
40.	UPTD. PUSKESMAS KACANG PEDANG	
40.1	drg. Muhammad Septiady 199009102019021006	Kuasa Pengguna Anggaran
40.2	Selvi Oktaviani, A.Md.Kes 199810212022032012	Bendahara Penerimaan BLUD
40.3	Lisma, AMK 198303262006042005	Bendahara Pengeluaran BLUD
40.4	Reski Amelia, A.Md Farm 199104222019022005	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD/BOK
41.	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN	
41.1	Rina Wijayanti, SKM 197703262000032002	Kuasa Pengguna Anggaran
41.2	Randi Ramadani, SKM 198705222006041003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
41.3	Sustrianti, A.Md.A.K 199611202020122005	Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
42.	UPTD. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
42.1	Kurniawan, S.Kep.,Ners,.M,.Kes 197010231996031002	Kuasa Pengguna Anggaran
42.2	Rosmayeni, SKM 197802272006042019	Bendahara Pengeluaran Pembantu
43.	KELURAHAN BATU INTAN	
43.1	Romi Jaguar, SH 198201282008011003	Kuasa Pengguna Anggaran
43.2	Sudaiman 196908122009011006	Bendahara Pengeluaran Pembantu
44.	KELURAHAN SEMABUNG BARU	
44.1	Wahyudi, A.Md 198208082011011002	Kuasa Pengguna Anggaran
44.2	Rangga Sumardiko 198105292007011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
45.	KELURAHAN SRIWIJAYA	
45.1	Dwi Yuda Catur Suciwiana, SH 198007082007011004	Kuasa Pengguna Anggaran
45.2	Alpian 197803022007011006	Bendahara Pengeluaran Pembantu
46.	KELURAHAN BUKIT BESAR	
46.1	Yurdani, SH 198102042000031001	Kuasa Pengguna Anggaran
46.2	Inzarnia Bandar Apriyani, A.Md 198804212011012004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
47.	KELURAHAN PASAR PADI	
47.1	Mareo Ebtana, SE 198503312011011004	Kuasa Pengguna Anggaran
47.2	Riyanto, S.AP 197611102006041010	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
48.	KELURAHAN RAWA BANGUN	
48.1	Yofanriansah, S.IP 198606212009031002	Kuasa Pengguna Anggaran
48.2	Siti Aisyah, S.Si 198705072015022002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
49.	KELURAHAN GEDUNG NASIONAL	
49.1	Suwanti, S.Mn 197712221999032001	Kuasa Pengguna Anggaran
49.2	Nayunda Rahmi Pratiwi, S.Tr.IP 200009132024092001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
50.	KELURAHAN KEJAKSAAN	
50.1	Yuli Akasiah, S.AP 198202022010012007	Kuasa Pengguna Anggaran
50.2	Herizon, SE 196910222009031001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
51.	KELURAHAN BATIN TIKAL	
51.1	Aryan, SH 197606042008011002	Kuasa Pengguna Anggaran
51.2	Rizal Saukani 197203202007011005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
52.	KELURAHAN OPAS INDAH	
52.1	Juni, SE 197906262008011003	Kuasa Pengguna Anggaran
52.2	Bellinda Purnamasari, SKM 198903052011012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
53.	KELURAHAN AIR SALEMBA	
53.1	Wawan Setiawan, S.IP 197810202008011004	Kuasa Pengguna Anggaran
53.2	Shendy Oktarianzie, S.ST 199410282019021003	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
54.	KELURAHAN SELINDUNG BARU	
54.1	Ahmat Pauzi, SH 197607022011011002	Kuasa Pengguna Anggaran
54.2	Isjuardi, S.AP 197601122008011001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
55.	KELURAHAN GABEK DUA	
55.1	Ayu Eryanti, S.STP 199209222014062001	Kuasa Pengguna Anggaran
55.2	Sulastri, SKM 197103231999032005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
56.	KELURAHAN GABEK SATU	
56.1	Dedi Erfandi, S.AP 197905152007011028	Kuasa Pengguna Anggaran
56.2	Desi Ekawati 196812071994122005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
57.	KELURAHAN SELINDUNG	
57.1	Musyadi, SH 197907172008011007	Kuasa Pengguna Anggaran
57.2	Alyn, S.AP 198911172011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
58.	KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG	
58.1	Suswoyo, S.IP 197612122008011003	Kuasa Pengguna Anggaran
58.2	Fitri Hastuti, A.Md 198505282011012009	Bendahara Pengeluaran Pembantu
59.	KELURAHAN PASIR GARAM	
59.1	Fahlevi Pradidaya, ST 198605202015021003	Kuasa Pengguna Anggaran
59.2	Choppy Ismanto, S.Ikom 197911082007011012	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
60.	KELURAHAN REJOSARI	
60.1	Deddi Chandra Sartika, S.IP 198102182008011003	Kuasa Pengguna Anggaran
60.2	Hayuni Gita Devi, SE 198306112014072001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
61.	KELURAHAN KETAPANG	
61.1	Daryansih, SKM 198204262005012005	Kuasa Pengguna Anggaran
61.2	Rehardiansyah, S.Ap 198006042007011015	Bendahara Pengeluaran Pembantu
62.	KELURAHAN LONTONG PANCUR	
62.1	Adly, S.Pd, SD 198109222010011012	Kuasa Pengguna Anggaran
62.2	Fath Dika Anugrah, SKM 198605292009041001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
63.	KELURAHAN AMPUI	
63.1	Haryuda Putra, SH 198209142007011002	Kuasa Pengguna Anggaran
63.2	Budiarti Widiastuty, SKM 198003102011012003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
64.	KELURAHAN KACANG PEDANG	
64.1	Ikhsan Sugiarto, S.STP, M.Tr.A.P 199009162012061001	Kuasa Pengguna Anggaran
64.2	Susilowati, S.E, M.M 197407072009032002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
65.	KELURAHAN BUKIT MERAPEN	
65.1	Yesi Hervina, S.E 198202282008012005	Kuasa Pengguna Anggaran
65.2	Septeawati 197509282008012003	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
66.	KELURAHAN AIR KEPALA TUJUH	
66.1	Basori Setiawan, S.STP, M.AP 198506302004121001	Kuasa Pengguna Anggaran
66.2	Desisra Kurniati, S.E 198107192002122002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
67.	KELURAHAN BUKIT SARI	
67.1	Indri Oktania, S.E., M.M 198510022011012004	Kuasa Pengguna Anggaran
67.2	A. Rizal 197002142006041003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
68.	KELURAHAN TUA TUNU INDAH	
68.1	Iwan Bernadi, ST 198001182006041007	Kuasa Pengguna Anggaran
68.2	Suryana, S.AP 197605062012122002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
69.	KELURAHAN TAMAN BUNGA	
69.1	Koko Hendarto, S.Sos 198105052009031010	Kuasa Pengguna Anggaran
69.2	Eka Ratih, AMK 198001012006042035	Bendahara Pengeluaran Pembantu
70.	KELURAHAN ASAM	
70.1	Miftahus Surur, SP 196810171991031002	Kuasa Pengguna Anggaran
70.2	Wahyu Winarti, SE 197403012011012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
71.	KELURAHAN MELINTANG	
71.1	Imam Firdaus, SH 197107022007011005	Kuasa Pengguna Anggaran
71.2	Erma Apriyanti, A.Md 198304212011012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
72.	KELURAHAN GAJAH MADA	
72.1	Hayrul, S.AP 197811122008011004	Kuasa Pengguna Anggaran
72.2	Sulasteri 197801022012122003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
73.	KELURAHAN KERAMAT	
73.1	Jonsory Laviko, SKM 198301162010011012	Kuasa Pengguna Anggaran
73.2	Usman James, SE 197010171993031001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
74.	KELURAHAN PINTU AIR	
74.1	Ainal Yaqin, SH 197311061997031002	Kuasa Pengguna Anggaran
74.2	Satibi Darwis, SE 197408152006041009	Bendahara Pengeluaran Pembantu
75.	KELURAHAN MASJID JAMIK	
75.1	Samsudin, S.Kom., M.M 198110062014071002	Kuasa Pengguna Anggaran
75.2	Utsman Zulkarnain Hasan, S.Tr.IP 200302272024091001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
76.	KELURAHAN BINTANG	
76.1	Roy Ronaldi, SE 197911052010011011	Kuasa Pengguna Anggaran
76.2	Rossita 197009132007012008	Bendahara Pengeluaran Pembantu
77.	KELURAHAN PARIT LALANG	
77.1	Djumri Sufrin, S.AP 197409062005011009	Kuasa Pengguna Anggaran
77.2	Irwan Adinolpi 197303242008011004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
78.	KELURAHAN PASIR PUTIH	
78.1	Randi Aprianto, S.STP, M.AP 198604202006021001	Kuasa Pengguna Anggaran
78.2	Sarmina, S.Pd 197409122007012012	Bendahara Pengeluaran Pembantu
79.	KELURAHAN BACANG	
79.1	Arli, SH 197007232001031001	Kuasa Pengguna Anggaran
79.2	Dedi Sudarmadi, ST 197912232011011002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
80.	KELURAHAN AIR MAWAR	
80.1	Anton Martjuda, S.KS, S.STP 199003052012061001	Kuasa Pengguna Anggaran
80.2	Sutrisman 197705202008011004	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
81.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
81.1	Drs. H. Agustu Afendi, M.Si 196708091994031004	Pengguna Anggaran
81.2	Agnes Tanti Riski Putri, S.Sos 199705152022032017	Bendahara Pengeluaran
82.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
82.1	Dr. David Oktaviandi, SP., MT 197410262002121004	Pengguna Anggaran
82.2	Tri Agustina, S.Pi 198908272019022005	Bendahara Penerimaan
82.3	Nuryani 197105232006042012	Bendahara Pengeluaran
83.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
83.1	Yansyah Tri Darmawan Putra, S.STP.,M.AP 197601101996021003	Pengguna Anggaran
83.2	Hayati Bariyah, A.Md 197407212007012016	Bendahara Penerimaan
83.3	Enni Friyanti, S.T 198110142010012021	Bendahara Pengeluaran
84.	KELURAHAN SEMABUNG LAMA	
84.1	Rusdi, S.IP 198210032008011005	Kuasa Pengguna Anggaran
84.2	Agustin Tripitri Karyanti, S.ST 198008142006042012	Bendahara Pengeluaran Pembantu
84.	KELURAHAN AIR ITAM	
84.1	Karta Kury, S.IP., M.Si 198808052011011001	Kuasa Pengguna Anggaran
84.2	Suyanti 198304032012122004	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
85.	KELURAHAN SINAR BULAN	
85.1	Teguh Arifianto, S.I.Kom 198612292010011010	Kuasa Pengguna Anggaran
85.2	Sudarwin 197811202007011017	Bendahara Pengeluaran Pembantu
86.	KELURAHAN TEMBERAN	
86.1	Iswansyah, SH 197610122008011001	Kuasa Pengguna Anggaran
86.2	Nurhayati, A.Mk 198912012011012003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
87.	BAGIAN UMUM	
87.1	Eko Priyanto, S.E, M.Si 198301132008041001	Kuasa Pengguna Anggaran
87.2	Rizka Fitrianda 198008232007011010	Bendahara Pengeluaran Pembantu
88.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
88.1	Yudi Pernando, S.T 197705052002121009	Kuasa Pengguna Anggaran
88.2	Erwin Purnama 197401272007011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
89.	BAGIAN PEMERINTAHAN	
89.1	Dian Lestari, S.STP., M.M 198206052000122001	Kuasa Pengguna Anggaran
89.2	Syarifah Annisah, S.Sos 199704222020122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
90.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
90.1	Drs. Juhaini 197406151999031002	Kuasa Pengguna Anggaran
90.2	Yeni Ningsih 198101132009032002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
91.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
91.1	Mirza Kurniawan, S.STP.,M.Tr.I.P 199010162012061001	Kuasa Pengguna Anggaran
91.2	Titin Apriani, S.T 199604292020122002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
92.	BAGIAN ORGANISASI	
92.1	H. Saiful Akbari, S.IP., M.SI 197003221989031002	Kuasa Pengguna Anggaran
92.2	Siti Srianah, S.IP 198110202006042019	Bendahara Pengeluaran Pembantu
93.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
93.1	Haris Munandar, S.STP, M.Tr.I.P 198301152001121002	Kuasa Pengguna Anggaran
93.2	Saputra Utama, A.Md 198704032010011008	Bendahara Pengeluaran Pembantu
94.	BAGIAN HUKUM	
94.1	Rusmi Toiyibah, S.AP 196908091990032002	Kuasa Pengguna Anggaran
94.2	Ariska Mega Silviani, S.H 198703292015022002	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
95.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
95.1	Mashur Samsuri, S.H 198412272009011001	Kuasa Pengguna Anggaran
95.2	Dewi Dheandra Sonia, S.S 200009012025042008	Bendahara Pengeluaran Pembantu
96.	DINAS TENAGA KERJA	
96.1	Amrah Sakti, S.H, M.H 197409301995031002	Pengguna Anggaran
96.2	Tri Apria Sari, A.Md 198604062010012016	Bendahara Pengeluaran
96.3	Siska Amalya, S.Sos 198001012009032004	Bendahara Penerimaan

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

SAPARUDIN